

DANA KAMPANYE PILKADA

PENGATURAN TEKNIS TENTANG SUMBANGAN,
PENGELUARAN, DAN PELAPORAN BERDASARKAN
UU NO 1/2015 JUNCTO UU NO 8/2015

TIM PERLUDEM



BASA-BASI DANA KAMPANYE

PENGABAIAN PRINSIP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PESERTA PEMILU

DIDIK SUPRIYANTO dan LIA WULANDARI

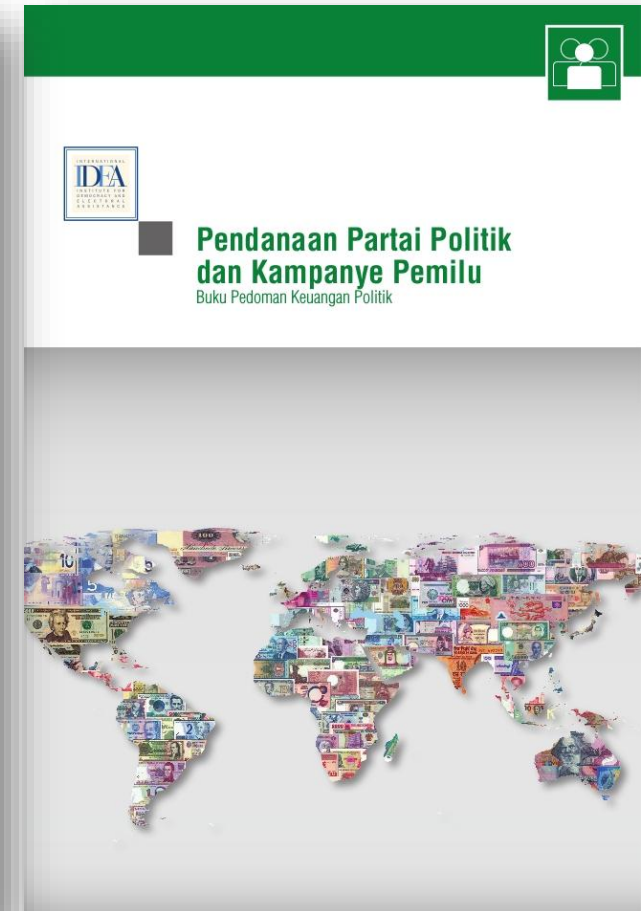


ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK

PENGATURAN DAN PRAKTEK

VERI JUNAIDI, DKK

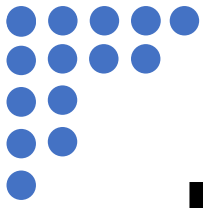
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia



Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu

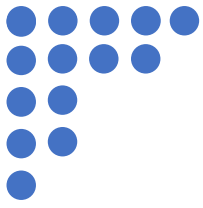
Buku Pedoman Keuangan Politik



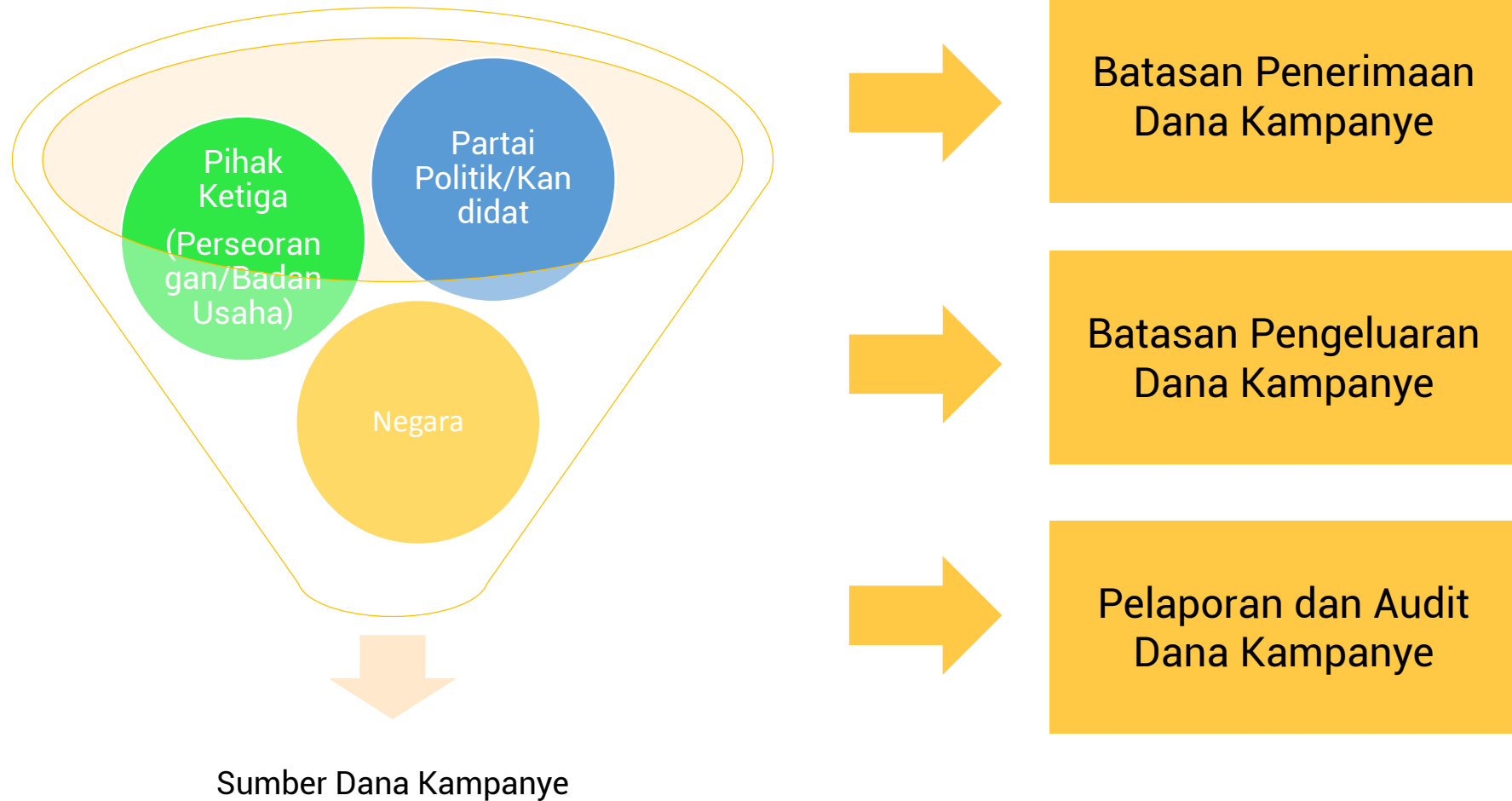


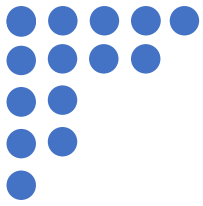
Party Finance & Party Campaign Finance

- Van Beizen (2003) dalam studinya *Financing Political Parties and Election Campaign Guidelines*: dua arena keuangan politik yakni “pembiayaan partai politik” yang merujuk pada arena diluar pemilu dan “pembiayaan kampanye” merujuk pada arena pemilu.
- Alexander (1989: 9-23) dalam studinya *Money and Politics, Rethinking Conceptual Framework* menjelaskan salah satu aspek terpenting dari keuangan partai politik ialah memahami peran dan fungsi uang dalam politik adalah terletak pada bagaimana uang dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapatkan pengaruh, untuk dirubah menjadi sumberdaya dalam bentuk lain, atau digunakan bersamaan dengan sumberdaya lain untuk mencapai kekuasaan politik.
- **political party finance**: uang diperoleh dan digunakan oleh partai politik untuk menjalankan roda organisasi partai dan menjalankan fungsi kepartaiannya diluar pemilu;
- **political party campaign finance**: uang diperoleh dan digunakan oleh partai politik untuk meraih dukungan pemilih pada tahapan kampanye dalam rangka memenangkan pemilu.



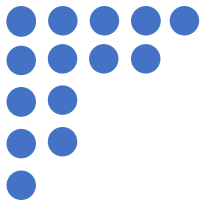
Isu Krusial Dana Kampanye





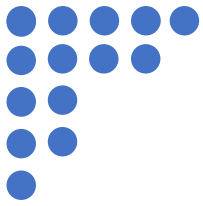
Penerapan Batasan Sumbangan Dari Kandidat

Continent	Donation Limit For Private Persons Apply	Specific Limit For Candidates	No	No Data	Countries Researched
Africa	1 (2.0%)	3 (5.9%)	38 (74.5%)	9 (17.6%)	51
Americas	2 (6.1%)	7 (21.2%)	23 (69.7%)	1 (3.0%)	33
Asia	4 (11.4%)	8 (22.9%)	16 (45.7%)	8 (22.9%)	35
Europe	8 (18.6%)	7 (16.3%)	22 (51.2%)	6 (14.0%)	43
Oceania	2 (14.3%)	0 (0.0%)	10 (71.4%)	2 (14.3%)	14
Total	17	25	109	26	176



Latar Belakang Kehadiran Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

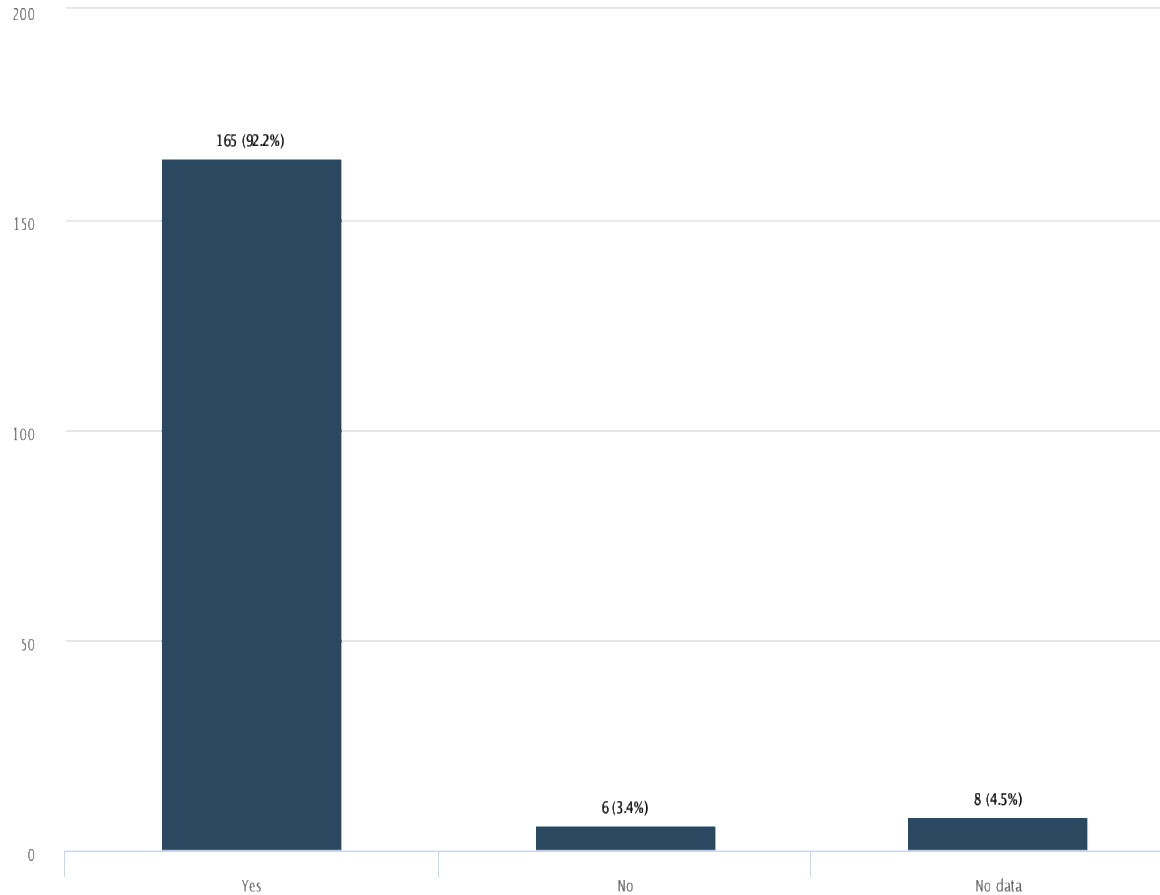
Alasan	Penjelasan	
Membatasi keuntungan politis kandidat/partai dengan akses dana yang besar	Pembatasan donasi akan lebih efektif mencapai tujuan tersebut. Pembatasan pengeluaran dapat merugikan partai/kandidat yang berhasil mengumpulkan donasi-donasi kecil dalam jumlah banyak, dan donasi kecil pada umumnya layak diperjuangkan.	
Mengurangi jumlah uang yang dikeluarkan sebagai belanja kampanye	Pengeluaran dalam jumlah besar pada umumnya dipandang negatif, terutama di negara-negara dengan populasi orang miskin yang tinggi, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan pada partai/kandidat.	
Pertimbangan	Pilihan utama	Penejelasan
Kalkulasi	Jumlah tetap (misalnya US \$1000 per partai/kandidat)	Mudah dipahami, tetapi tidak memperhatikan variasi dalam ukuran daerah pemilihan.
	Jumlah per suara yang diraih (misalnya \$1 untuk setiap suara)	Memperhatikan ukuran daerah pemilihan (butuh pengeluaran lebih besar pada daerah pemilihan yang besar); tetapi kurang memperhatikan ukuran geografis suatu daerah pemilihan.
Angka eksplisit atau indeks inflasi	Jumlah Eksplisit (misalnya \$1000)	Mudah dipahami, tetapi inflasi dapat secara cepat menggerogoti nilai aktualnya.
	Berdasarkan upah minimum	Seara otomatis disesuaikan dengan tingkat inflasi, dengan asumsi upah minimum dipertahankan.
	Berdasarkan upah rata-rata	Tidak tergantung pada kebijakan pemerintah sebagaimana upah minimum, tetapi membutuhkan data statistik yang terpercaya.



Larangan Vote Buying

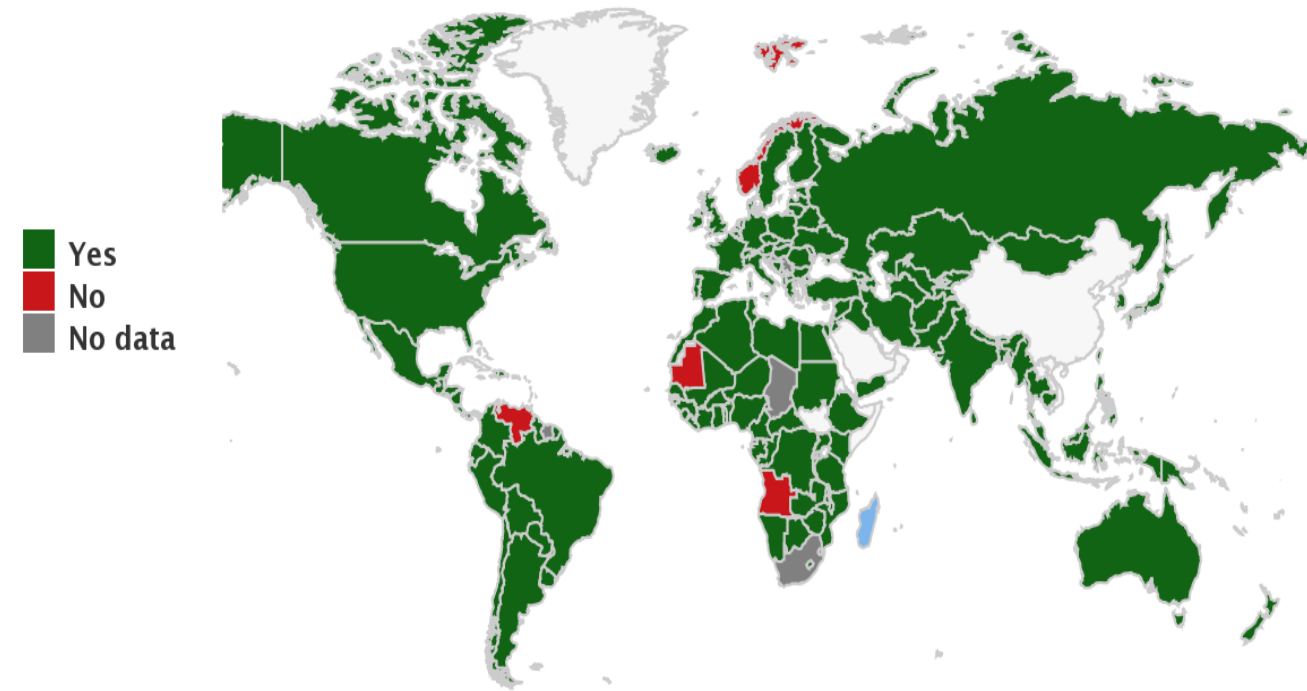
40. Is there a ban on vote buying?

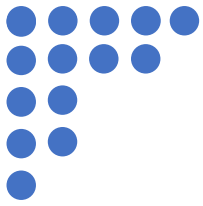
Worldwide
Political Finance Database - Regulations of spending
Data for 179 countries



40. Is there a ban on vote buying?

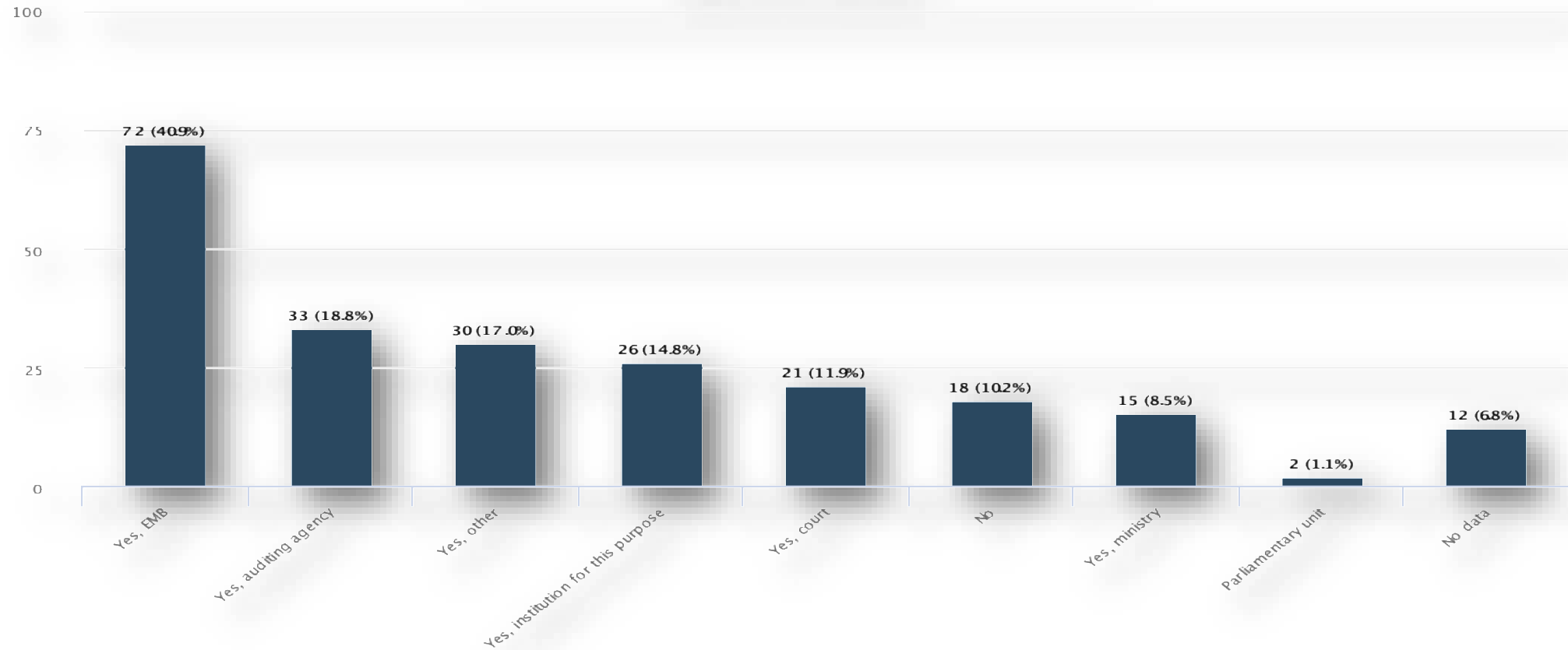
Political Finance Database - Regulations of spending





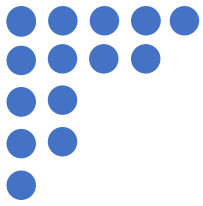
57. Is it specified that a particular institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?

Worldwide
Political Finance Database – Reporting, oversight and sanctions
Data for 176 countries



Ketentuan Dana Kampanye di Australia

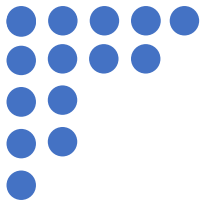
	Federal	New South Wales	Victoria	South Aus	Queensland	Tasmania	Western Aus	Aus Capital Territory	Northern Territory
Disclosure Threshold	\$ 13 800	\$1 000	\$1 000	\$5 191	\$1 000	X	\$2 500	\$1 000	\$1 500
Donation Cap (to party)	X	\$6 300 (yearly)	\$4 000 (4 years)	X	X	X	X	X	X
Anonymous Donation Threshold	\$1 000	\$1 000	\$1 000	\$200	\$1 000	X	\$2 300	\$1 000	\$1 000
Expenditure Cap (max for party)	x	~\$11m	X	~\$4m	X	X	X	\$1m \$40 000 per candidate	X
Per Seat Expenditure Cap	X	\$61.5k	X	\$100k	X	X	X	X	X



Batasan Sumbangan UU Pemilu dan UU Partai Politik

Perusahaan			
UU Pemilu		UU Partai Politik	
UU 12/2003	Rp. 750.000.000	UU 31/2002	Rp. 800.000.000
UU 10/2008	Rp. 5.000.000.000	UU 2/2008	Rp. 4.000.000.000
UU 8/2012	Rp. 7.500.000.000	UU 2/2011	Rp. 7.500.000.000
UU 7/2017	Rp. 25.000.000.000		

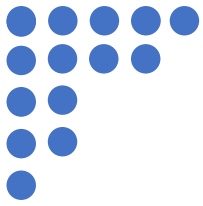
Perseorangan			
UU Pemilu		UU Partai Politik	
UU 12/2003	Rp. 100.000.000	UU 31/2002	Rp. 200.000.000
UU 10/2008	Rp. 1.000.000.000	UU 2/2008	Rp. 1.000.000.000
UU 8/2012	Rp. 1.000.000.000	UU 2/2011	Rp. 1.000.000.000
UU 7/2017	Rp. 2.500.000.000		



Larangan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

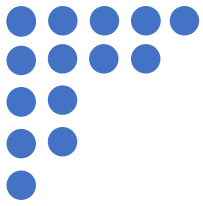
- Sumbangan yang berasal dari pihak asing;
- Sumbangan yang tidak memiliki identitas jelas;
- Sumbangan yang berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Sumbangan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan pemerintah desa beserta badan usaha milik desa.

Setiap peserta pemilu yang memperoleh sumbangan dari empat sumber ini akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda sebanyak Rp. 36.000.000. Jika terdapat pihak ketiga yang didapati memberikan donasi melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp. 500.000.000 (UU 7/2017)



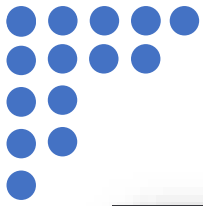
Penerimaan Dana Kampanye Pemilu DPR 2019

PARTAI POLITIK	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			SUMBANGAN PESERTA PEMILU		PENERIMAAN LAIN-LAIN		
	PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PARTAI POLITIK	CALEG	LAIN-LAIN KOMITMEN	BUNGAN BANK	
PKB	1.300.000.000		7.425.000.000	10.000.000	133.587.647.279			
Gerindra				1.006.771.946	133.715.077.635			
PDIP				6.675.680.601	338.339.772.456		9.624.760	
Golkar	100.000.000		395.000.000	72.010.000.000	235.131.587.510		2.290.194	
Nasdem			1.000.000.000	80.610.513.963	177.863.557.751			
Garuda	400.000.000			31.000.000	3.044.515.041			
Berkarya	1.200.000.000			100.000.000	105.864.300.058			
PKS	1.000.000.000			9.376.131.477	139.666.622.439			
Perindo				88.134.658.000	123.606.099.035	16.497.617.400		
PPP				12.413.250.000	64.138.502.526			
PSI	3.809.570.046		6.270.503.540	31.922.379.050	42.657.646.880		87.269	
PAN				100.000.000	168.948.328.526			
Hanura	13.000.000	9.522.500.000		11.104.310.300	28.858.287.278		19.236	
Demokrat	7.158.137.000			1.700.957.452	180.871.110.071		2.449.086	
PBB				501.534.722	117.356.000.002			
PKPI	4.761.004.000			-	1.530.743.254			
Jumlah	19.741.711.046	9.522.500.000	15.090.503.540	315.697.187.511	1.995.179.797.741	16.497.617.400	14.470.545	
Porsi Penerimaan %	0,83	0,40	0,64	13,31	84,12	0,70	0,00	
Total Keseluruhan							2.371.743.787.783	



Laporan Dana Kampanye

- Laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lama 14 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh penyelenggara pemilu.
- Laporan dana kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 hari sesudah pemungutan suara (UU No. 7/2017, Pasal 335 ayat (1))
- Pasal 338 memuat ketentuan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan dimana partai politik tersebut tidak melaporkan dana kampanye.



Transparansi Laporan Dana Kampanye

Browser address bar: pilkada2017.kpu.go.id/dana-kampanye

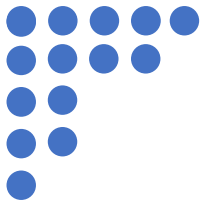
Navigation bar: **Komisi Pemilihan Umum** | BERANDA | INFORMASI UMUM | **KAMPANYE** | PENCALONAN | SENGKETA | PEMILIH | HASIL | PEMENANG | API | SITAP 2015

Dana Kampanye

Dana Kampanye Pilkada 2017

Show entries Search:

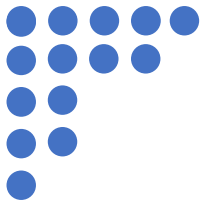
No	DAERAH PEMILIHAN	Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye	Nomor Urut	NAMA CALON KEPALA DAERAH	NAMA WAKIL CALON KEPALA DAERAH	Saldo Awal Reksus	LADK	Jml. Penerimaan (LADK)	Jml. Pengeluaran (LADK)	LPSDK	Jml. Penerimaan (LPSDK)	Hasil Audit LPPDK	Jml. Penerimaan (LPPDK)	Pen (I
1	ACEH	89.678.065.000	5	H. Muzakir Manaf	Ir. H. T.A. Khalid, M.M	100.000.000	↓	100.000.000	100.000.000	↓	427.000.000	↓	8.721.000.000	8.72
2	ACEH	89.678.065.000	6	Drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc	Ir. H. Nova Iriansyah, MT.	10.000.000	↓	10.000.000	566.000.000	↓	1.471.000.000	↓	5.353.439.287	5.35:
3	ACEH	89.678.065.000	1	Ir. H. Tarmizi A. Karim, M.Sc.	Ir. H. T. Machsalmina Ali, M.M.	20.000.000	↓	20.000.000	100.000	↓	1.450.000.000	↓	1.845.000.000	1.84:
4	ACEH	89.678.065.000	4	dr. H. ZAINI ABDULLAH	Ir. H. NASARUDDIN, MM	451.000.000	↓	451.000.000	425.025.000	↓	1.400.000.000	↓	4.989.600.000	4.93:
5	ACEH	89.678.065.000	2	ZAKARIA SAMAN	Ir. H. T. ALAIDINSYAH, M.Eng	100.000	↓	0	0	↓	0	↓	10.450.000.000	10.4:
6	ACEH	89.678.065.000	3	Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si	Sayed Mustafa Usab Al-Idroes, SE, M.Si	1.000.000	↓	1.000.000	0	↓	0	↓	245.000.000	183.:



Partai Politik Dibatalkan Sebagai Peserta Karena Tidak Melaporkan Dana Kampanye

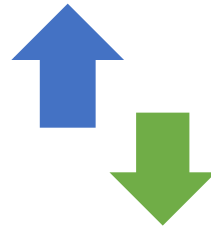
Partai Politik	Jumlah Daerah yang Dibatalkan	Nama Daerah
Nasdem	0	-
PKB	2	Kab. Tabanan & Kota Tomohon
PKS	2	Kota Tomohon & Kab. Toraja Utara
PDIP	1	Kab. Timor Tengah Selatan
Golkar	0	-
Gerindra	1	Kab. Donggala
Demokrat	2	Kab. Aceh Singkil & Kab. Majalengka
PAN	1	Kab. Pelalawan
PPP	2	Kota Gunung Sitoli
Hanura	0	-
PBB	10	Kab. Serdang Bedagai, Kota Gunung Sitoli, Kota Sungai Penuh, Kab. Ngada, Kab. Sumba Barat, Kab. Bengkayang, Kab. Hulu Sungai, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Toraja Utara, & Kota Tomohon
PKPI	4	Kepulauan Anambas, Kab. Probolinggo, Kab. Hulu Sungai Selatan, & Kab. Gorontalo Utara

Bawaslu mengabulkan sebagian permohonan antara lain permohonan Partai Gerindra di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; PKPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan; serta PBB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Husein & Pramono 2017: 314).

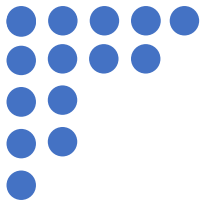


Dana Kampanye dan Integritas Pemilu

Uang adalah salah satu isu sentral di dalam kontestasi pemilu. Menentukan bagaimana kontestasi berjalan, bahkan pemenang pemilu



Penggunaan uang diperbolehkan, bahkan dalam jumlah besar, tetapi berbasiskan transparansi dan akuntabilitas



Regulasi Dana Kampanye dan Daya Jangkaunya Terhadap Realitas

Bawaslu punya kewenangan memastikan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye

Konsolidasi Kewenangan belum maksimal (Bawaslu, PPATK OJK, KPK)

